

**PENGARUH NASIONALISME, KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH DAN HUKUM, PEMAHAMAN, SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :
FENNY NURNUGRAHENI DIAH SAPUTRI
B 200 150 117**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH NASIONALISME, KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH DAN HUKUM, PEMAHAMAN, SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FENNY NURNUGRAHENI DIAH SAPUTRI
B 200 150 117

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak., CA
NIDN: 0609016002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH NASIONALISME, KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH DAN HUKUM, PEMAHAMAN, SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta)**

OLEH:

FENNY NURNUGRAHENI DIAH SAPUTRI
B200 150 117

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unniversitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 12 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, M.Si.,Ak.,CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Mujiyati, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Nursiam, M.H.,Ak
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unniversitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM.)

NIK.NIP : 19570217 1986 031 001

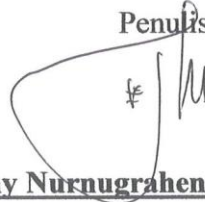
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 November 2019

Penulis



Fenny Nurnugraheni Diah Saputri

B 200 150 117

**PENGARUH NASIONALISME, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH
DAN HUKUM, PEMAHAMAN, SERTA SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta)**

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman, serta sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak.

Kata kunci : nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman perpajakan, sanksi pajak

Abstract

The main objective of this research is to examine the influence of Nationalism, Trust in Government and Law, Understanding of tax regulation, Tax Penalties. The population in this study are individual taxpayers registered in KPP Pratama Surakarta. The sampling technique used is Convenience Sampling, which is a sampling technique based on members of the population met by researchers and willing to be respondents to be sampled. The sample used in this study amounted to 60 respondents. In this study to analyze the data used multiple regression analysis. The results showed that Nationalism, Trust in Government and Law, Understanding of tax regulation, Tax Penalties had a significant positive effect on taxpayers in fulfilling taxpayer obligations.

Keywords: nationalism, trust in government and law, understanding of tax regulation, tax penalties

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam pembayaran pajak terdapat prinsip *self assessment* dimana mewajibkan wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri serta melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, maupun pos.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Jika dalam menjalankan kewajibannya, Wajib Pajak sudah memenuhi kriteria-kriteria seperti mendaftarkan diri ke KPP, menghitung dan memotong pajak dengan benar, menyampaikan SPT, dan membayar tunggakan pajak maka wajib pajak sudah dapat dikatakan patuh.

Kepatuhan (bahasa Inggris : *compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan, kemauan, dan kemampuan Wajib Pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaporkan penghasilan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya kurangnya kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata. Kepatuhan sangat penting dan sangat diusahakan oleh kantor pajak dengan melakukan sosialisasi agar para wajib pajak paham dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Serta kantor pajak lebih menekankan pada sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan. Pemerintah menegakkan hukum tanpa tebang pilih agar setiap wajib pajak patuh akan kewajibannya tanpa memandang suatu kalangan tertentu. Adanya rasa nasionalisme, kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum, pemahaman yang luas mengenai perpajakan serta sanksi yang berlaku juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri; sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Wajib pajak yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan timbul rasa tanggungjawab untuk memajukan dan membuat negaranya menjadi lebih baik sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepercayaan adalah (1) anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan dari wajib pajak kepada pemerintah sebagai pihak yang menjalankan sistem pemerintahan dan juga hukum yang berlaku di suatu negara untuk menjalankan sistem sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya terhadap pemerintah dan hukum ini sangat berpengaruh terhadap keputusannya dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tariff pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Selain pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Pengaruh Nasionalisme, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Pengetahuan, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta)”**

2. METODE

Desain penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan dan diisi oleh responden serta data mengenai gambaran umum responden. Populasinya adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling*. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel sebanyak 100 WPOP. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian, Nasionalisme, Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Pemahaman, serta Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependennya. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari: Uji Statistik Deskriptif, Pengujian Instrumen (terdiri dari Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas), Pengujian Asumsi Klasik (terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji F), Regresi Berganda, Uji t dan Uji R².

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel (Siregar, 2016:148). Dengan alasan tidak semua wajib pajak bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Menurut Cohen, et.al, (2007, hlm.101) semakin besar sample dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel.

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No		Jumlahkuesioner yang terpakai
1	Kuesiner yang disebar	100
2	Kuesioner yang kembali	100
3	Kuesioner yang diisi tidak lengkap atau rusak	0
	Kuesioner yang dapat di analisis sebanyak	100

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	49	49%
2	Perempuan	51	51%
	Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil karakteristik responden tentang jenis kelamin yang mendominasi adalah perempuan yaitu sebesar 51 responden atau sebesar 51% sedangkan laki-laki sebanyak 49 responden atau sebesar 49%.

Tabel 3. Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Prosentase
1	< 25 Tahun	10	10%
2	26-35 Tahun	42	42%
3	>35 Tahun	48	48%
	Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan karakteristik responden diatas diketahui bahwa umur responden didominasi umur lebih dari 35 tahun yaitu sebanyak 48 responden atau sebesar 48%, umur 26-35 tahun sebanyak 42 responden atau sebesar 42% dan kurang dari 25 tahun sebanyak 10 responden atau sebesar 10%.

Tabel 4. Pendapatan Responden

No	Pendapatan	Jumlah	Prosentase
1	< 30 Juta	9	9%
2	31 – 40 Juta	36	36%
3	> 40 Juta	65	65%
	Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2019

Hasil karakteristik responden berdasarkan pendapatan didominasi lebih dari 40 juta yaitu sebanyak 65 responden atau sebesar 65%, kemudian pendapatan 31-40 juta sebanyak 36 responden atau sebesar 36% dan pendapatan kurang dari 30 juta sebanyak 9 responden atau sebesar 9%.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Wiraswasta	43	43%
2	Swasta	37	37%
3	Admin	1	1%
4	PNS	11	11%
5	Guru	6	6%
6	Back Office	1	1%
7	BUMN	1	1%
Total		100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2019

Hasil karakteristik responden berdasarkan pekerjaan didominasi yaitu wiraswasta sebanyak 43 responden atau sebesar 43%, swasta sebanyak 37 responden atau sebesar 37%, kemudian PNS sebanyak 11 responden atau sebesar 11%, guru sebanyak 6 responden atau sebesar 6%, admin, back office dan bumh sebanyak masing-masing 1 responden atau sebesar 1%.

3.2 Hasil Analisis

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Nasionalisme

Item	(r_{hitung})	r_{tabel}	Nilai Sig	α	Keterangan
1	0,608	0,254	0,000	0,05	Valid
2	0,839	0,254	0,000	0,05	Valid
3	0,840	0,254	0,000	0,05	Valid
4	0,733	0,254	0,000	0,05	Valid
5	0,664	0,254	0,000	0,05	Valid

Sumber :Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas data diketahui bahwa uji r -hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r -tabel. Nilai r -tabel diambil dari jumlah sample 100 sebesar 0,254. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner variabel nasionalisme adalah valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

Item	(r_{hitung})	r_{tabel}	Nilai Sig	α	Keterangan
1	0,769	0,254	0,000	0,05	Valid
2	0,775	0,254	0,000	0,05	Valid
3	0,589	0,254	0,000	0,05	Valid
4	0,886	0,254	0,000	0,05	Valid
5	0,776	0,254	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas data diketahui bahwa uji r -hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r -tabel. Nilai r -tabel diambil dari jumlah sample 100 sebesar 0,254. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner variabel kepercayaan pada pemerintah dan hukum adalah valid.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

Item	(r_{hitung})	r_{tabel}	Nilai Sig	α	Keterangan
1	0,774	0,254	0,000	0,05	Valid
2	0,823	0,254	0,000	0,05	Valid
3	0,830	0,254	0,000	0,05	Valid
4	0,872	0,254	0,000	0,05	Valid
5	0,785	0,254	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas data diketahui bahwa uji r-hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r-tabel. Nilai r-tabel diambil dari jumlah sample 100 sebesar 0,254. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner variabel pemahaman perpajakan adalah valid.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Item	(r_{hitung})	r_{tabel}	Nilai Sig	α	Keterangan
1	0,884	0,254	0,000	0,05	Valid
2	0,863	0,254	0,000	0,05	Valid
3	0,921	0,254	0,000	0,05	Valid
4	0,848	0,254	0,000	0,05	Valid
5	0,762	0,254	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas data diketahui bahwa uji r-hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r-tabel. Nilai r-tabel diambil dari jumlah sample 100 sebesar 0,254. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner variabel sanksi perpajakan adalah valid.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	(r_{hitung})	r_{tabel}	Nilai Sig	α	Keterangan
1	0,706	0,254	0,000	0,05	Valid
2	0,560	0,254	0,000	0,05	Valid
3	0,778	0,254	0,000	0,05	Valid
4	0,453	0,254	0,007	0,05	Valid
5	0,632	0,254	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas data diketahui bahwa uji r-hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r-tabel. Nilai r-tabel diambil dari jumlah sample 100 sebesar 0,254. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha Hitung	Level Cronbach's Alpha	Keterangan
Nasionalisme	0,793	0,6	Reliabel
Kepercayaan	0,790	0,6	Reliabel
Pemahaman	0,867	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,906	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,606	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari tabel 11 di atas, diketahui bahwa nilai alpha dari instrumen untuk masing-masing variabel lebih besar dari tingkat *Cronbach's alpha* yaitu 0,6 sehingga bisa dikatakan instrumen yang digunakan dalam variabel adalah **reliable**.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

Variabel	Kolmogorov – Smirnov	Kriteria	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0,748		Data Terdistribusi
<i>Asymp sig (2-tailed)</i>	0,631	>0,05	Normal

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari tabel di atas uji *normalitas* dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-smirnov Test*. Hasil nilai *asympt Sig* diperoleh lebih besar bila dibandingkan dengan probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Kriteria	VIF	Kriteria	Keterangan
Nasionalisme	0,891	>0,10	1,122	<10	tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan	0,826	>0,10	1,210	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman	0,788	>0,10	1,269	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,987	>0,10	1,013	<10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF dan *Tolerance* hitung dari masing-masing variabel sesuai dengan kriteria pengujian ($VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$) sehingga dapat dikatakan pada model regresi yang digunakan tidak ditemukan tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 14. Hasil uji Heteroskedastisitas

Variabel	p-value (sig)	Keterangan
Nasionalisme	0,106	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepercayaan	0,430	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman	0,469	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,790	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau nilai signifikansi masing-masing variabel menunjukkan angka lebih dari 0,05. Sehingga dari hasil

tersebut dapat diartikan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari adanya heteroskedastisitas.

Tabel 15. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t _{hitung}	Sig
(Constant)	1,963	1,038	
N	0,547	7,816	0,000
KPH	0,117	2,040	0,044
P	0,111	2,142	0,035
SP	0,110	2,863	0,005

Sumber : Data primer diolah, 2019

$$KWP = 1,963 + 0,547N + 0,117KPH + 0,111P + 0,110SP + e$$

Dari hasil regresi di atas, secara statistik dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai Konstanta variabel kepatuhan wajib pajak adalah 1,963, hal ini berarti: apabila variabel bebas (nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman, sanksi perpajakan) diasumsikan nol sehingga kepatuhan wajib pajak akan konstan. Nilai koefisien variabel nasionalisme adalah 0,547 dengan hasil bertanda positif pada variabel nasionalisme menunjukkan bahwa semakin tinggi nasionalisme sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien variabel kepercayaan pada pemerintah dan hukum adalah 0,117 dengan hasil bertanda positif pada variabel kepercayaan menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien variabel pemahaman adalah 0,111 dengan hasil bertanda positif pada variabel pemahaman menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman sehingga semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien variabel sanksi pajak adalah 0,110 dengan hasil bertanda positif pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak sehingga semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Tabel 16. Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Kriteria	Keterangan
Nasionalisme	7,816	2,000	0,000	<0,05	H1 diterima
Kepercayaan	2,040	2,000	0,044	<0,05	H2 diterima
Pemahaman	2,142	2,000	0,035	<0,05	H3 diterima
Sanksi Perpajakan	2,863	2,000	0,005	<0,05	H4 diterima

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari hasil tabel 16 tersebut tersebut dapat diketahui hasil uji t. Variabel nasionalisme diketahui nilai t_{hitung} (7,816) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000<0,05. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya

variabel nasionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kepercayaan diketahui nilai t_{hitung} (2,040) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Oleh karena itu, H2 diterima, artinya variabel nasionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman diketahui nilai t_{hitung} (2,142) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Oleh karena itu, H3 diterima, artinya variabel pemahaman mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi perpajakan diketahui nilai t_{hitung} (2,863) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,031 < 0,05$. Oleh karena itu, H4 diterima, artinya variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 17. Hasil Uji F

F_{hitung}	F_{tabel}	$p-value$	Keterangan
27,588	2,27	0,000	Ho ditolak

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 27,588 dan F_{tabel} dapat dilihat dari tabel F pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 2,27. Berdasarkan hasil jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $27,588 > 2,27$ dan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga variabel nasionalisme, kepercayaan, pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian model regresi yang digunakan adalah layak.

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.537	.518	1,34728

Sumber : Data primer diolah, 2019

Hasil perhitungan nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted $-R^2$ sebesar 0,518. Hal ini berarti bahwa 51,8% variasi variabel dapat dijelaskan oleh variabel nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman dan sanksi perpajakan sedangkan sisanya yaitu 48,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel nasionalisme diketahui nilai t_{hitung} (7,816) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, H_1 diterima, artinya variabel nasionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan para wajib pajak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Wajib pajak memiliki rasa kebanggaan menjadi bagian warga negara Indonesia, merasa bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, merasa turut berperan dalam pembangunan. Wajib pajak menyadari bahwa ketaatan membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta wujud cinta pada tanah air.

3.3.2 Pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kepercayaan pada pemerintah dan hukum diketahui nilai t_{hitung} (2,040) lebih besar dari pada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima, artinya variabel nasionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya wajib pajak yang belum percaya penuh terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan dikarenakan wajib pajak merasa adanya pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah, kurangnya pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat, masih ada perbedaan perlakuan dalam sistem hukum sehingga dirasa adanya ketidakadilan. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

3.3.3 Pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman diketahui nilai t_{hitung} (2,142) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,035 < 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima, artinya variabel pemahaman mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Pada umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai pajak, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPT, Pajak untuk pembangunan, dasar pengenaan pajak,

pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang mudah dilakukan. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan melalui perpajakan.

3.3.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi perpajakan diketahui nilai t_{hitung} (2,863) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Oleh karena itu, H_4 diterima, artinya variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan bagi wajib pajak telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda, dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,816 > 2,000$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka **H_1 diterima.**
- Variabel kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,040 > 2,000$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ maka **H_2 diterima.**
- Variabel pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,142 > 2,000$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$ maka **H_3 diterima.**
- Variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,863 > 2,000$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ maka **H_4 diterima.**

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah KPP sebagai objek yang akan diteliti
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang diteliti yaitu tidak hanya variabel nasionalisme, kepercayaan, pemahaman dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2. No. 3.
- Alfiah, I. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Presepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKA Grobogan-Purwodadi. *Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Kudus*.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2005, January). Russian tax morale in the 1990s. In *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association* (Vol. 98, pp. 287-292). National Tax Association.
- Fauziyah, L. (2008). Pengaruh karakteristik pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pbb.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Sapti Wuri., Agus Faturokhman., dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Ilhamsyah, R., & Maria, G. Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAKA Vol. 8 No. 1)*.
- Imelda, Bona. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Jatmiko, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi

- Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019. <https://kbbi.web.id/nasionalisme>, diakses pada tanggal 10 April 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019. <https://kbbi.web.id/percaya>, diakses pada tanggal 10 April 2019.
- Mardiasmo, M. (2006). Realization of transparency and public accountability through public sector accounting: A means of good governance. *Journal of Government Accounting*, 2(1), 1-17.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Permatasari, Aprilia., dan P. D'yan Yaniartha. 2012. Pengaruh Kesadaran WP Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB. *Jurnal Univeristas Udayana Bali*.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP 22 KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING*, 14(1), 22-39.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Versi Bahasa Indonesia. Prenhallindo. Jakarta
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3(1), 1-10.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94-102.